Published every April and October ISSN 2407-7348 (Print)
South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education
SIPATAHOENAN
Minda Masagi Foundation
ASOSIASI SARJANA PENDIDIKAN SEJARAH INDONESIA ASPENSI

ANDI SUWIRTA

Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus PEMILU 1971 dalam Pandangan Harian *Kompas* di Jakarta dan Harian *Pikiran Rakyat* di Bandung

INTISARI: *PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1971 adalah peristiwa penting bagi pemerintah Orde Baru. Dalam rangka untuk mencari dan mendapatkan legitimasi kekuasaan, pemerintah Orde Baru berusaha memenangkan GOLKAR (Golongan Karya) dalam besaing dengan partai-partai politik lainnya di Indonesia. Cara-cara GOLKAR menang dalam PEMILU tahun 1971, menjadi preseden dan dilanjutkan pada PEMILU selanjutnya. Manakala pers yang bersikap kritis kepada pemerintah Orde Baru, bahkan terhadap cara-cara GOLKAR dalam memenangkan PEMILU, harus menghadapi pembredelan. Penelitian ini – dengan menggunakan metode sejarah, pendekatan kualitatif, studi literatur, dan penjelasan yang deskriptif – mengkaji tentang pemberitaan dan pandangan surat kabar "Kompas" di Jakarta dan "Pikiran Rakyat" di Bandung dalam menghadapi PEMILU 1971 di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua surat kabar itu, pada umumnya, mendukung program dan kebijakan pemerintah Orde Baru, termasuk kemenangan GOLKAR dalam PEMILU tahun 1971. Kalau pun ada kritik dan pandangan yang berlainan dengan pemerintah Orde Baru, maka kedua surat kabar itu menyampaikannya secara tidak langsung dalam bahasa yang moderat, samar-samar, dan tidak menyinggung perasaan pemerintah Orde Baru yang tengah berkuasa.*
KATA KUNCI*: Pers dan Kritik Sosial; Surat Kabar Kompas dan Pikiran Rakyat; PEMILU 1971; Pemerintah Orde Baru.*

ABSTRACT*: "The Press and Social Criticism during the New Order: 1971 Election in the Views of Kompas Daily in Jakarta and the Pikiran Rakyat Daily in Bandung". The General Election in 1971 was an important event for the New Order government. In order to find and gain legitimacy of power, the New Order government tried to win the GOLKAR (Functional Group) in competing with other political parties in Indonesia. The ways that GOLKAR won in the 1971 General Election, set a precedent and continued with the next General Elections. When the press is critical of the New Order government, even GOLKAR's method of winning the General Election, it must face banning. This research – using historical methods, qualitative approaches, literature studies, and descriptive explanations – examines the news and views of the newspapers of "Kompas" in Jakarta and "Pikiran Rakyat" in Bandung in the face of the 1971 General Election in Indonesia. The results of the study showed that the two newspapers were, in general, supported the programs and policies of the New Order government, including the victory of GOLKAR in the 1971 General Election. If there were criticisms and views that were different from the New Order government, the two newspapers delivered it indirectly in a language that was moderate, vague, and did not offend the feelings of the New Order government which was in power.*
KEY WORD*: The Press and Social Criticism; Newspapers of Kompas and Pikiran Rakyat; General Election of 1971; New Order Government.*

About the Author: **Andi Suwirta, M.Hum.** adalah Dosen Senior di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, Penulis bisa dihubungi dengan alamat e-mail: suciandi@upi.edu
Suggested Citation: Suwirta, Andi. (2019). "Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus PEMILU 1971 dalam Pandangan Harian *Kompas* di Jakarta dan Harian *Pikiran Rakyat* di Bandung" in *SIPATAHOENAN: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, Volume 5(1), April, pp.31-52. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI with a print-ISSN 2407-7348.
Article Timeline: Accepted (February 9, 2019); Revised (March 2, 2019); and Published (April 30, 2019).

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia

PENDAHULUAN

PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1971, yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juli, merupakan PEMILU kedua dalam sejarah Indonesia modern. PEMILU pertama diselenggarakan pada tahun 1955, di bawah suasana politik Demokrasi Liberal, 1950-1959 (Liddle, 1992; Feith, 1999; Wardaya, 2004; Permadi & Aman, 2014; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017). Sedangkan PEMILU 1971 merupakan PEMILU pertama pada masa Orde Baru, 1966-1998, yang diadakan secara formal di bawah sistem Demokrasi Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. PEMILU tahun 1971 ini merupakan peristiwa penting bagi pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, terutama dalam usahanya melakukan konsolidasi dan legitimasi terhadap kekuasaannya yang syah menurut hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia (Eriyanto, 2000; Santoso, 2004; dan Suwirta, 2018).

Dalam pada itu, Ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) No.XI/MPRS/1966, antara lain, menyatakan bahwa yang melaksanakan PEMILU adalah pemerintah, yang penyelenggaraannya paling lambat pada tanggal 5 Juli 1968. Akan tetapi, karena Undang-Undang yang mengatur tentang PEMILU itu belum dapat diselesaikan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) tepat pada waktunya, maka PEMILU pun tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh MPRS tersebut (Liddle, 1992; Haris, 1998; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Melihat keadaan seperti itu, kemudian MPRS dalam Sidang Umumnya yang ke-5 tahun 1968 menentukan agar PEMILU harus diselenggarakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Ketentuan MPRS itu dituangkan dalam TAP (Ketetapan) MPRS No.XLII/MPRS/1968, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris MPRS, dalam hal ini pemerintah Orde Baru, di bawah pimpinan Presiden Soeharto (Sagala, 1982:43; Liddle, 1992; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Maka pada tanggal 23 Mei 1970, Presiden Soeharto dengan Surat Keputusan Presiden No.43 telah menetapkan organisasi-organisasi yang dapat ikut-serta dalam PEMILU tahun 1971 dan anggota DPR/DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang akan diangkat. Organisasi-organisasi politik yang dapat ikut-serta dalam PEMILU tahun 1971 itu ialah partai-partai politik yang pada saat menjelang pelaksanaan PEMILU sudah ada dan diakui oleh pemerintah Orde Baru, serta mempunyai wakil-wakilnya di DPR/DPRD (Tambunan, 1986; Liddle, 1992; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Adapun partai-partai politik peserta PEMILU 1971 itu adalah: (1) IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia; (2) Partai Murba; (3) NU atau Nadhatul Ulama; (4) PI PERTI atau Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam; (5) PK atau Partai Katolik; (6) PARKINDO atau Partai Kristen Protestan Indonesia; (7) PARMUSI atau Partai Muslimin Indonesia; (8) PNI atau Partai Nasional Indonesia; dan (9) PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia. Adalah menarik bahwa organisasi GOLKAR atau Golongan Karya, yang ikut dalam PEMILU 1971, tidak mau disebut sebagai "partai politik". Organisasi yang mendapat dukungan dari pemerintah Orde Baru dan tentara Angkatan Darat itu dalam PEMILU 1971 menyebut dirinya sebagai SEKBER GOLKAR atau Sekretariat Bersama Golongan Karya (Poesponegoro & Notosusanto eds., 1987:427; Liddle, 1992; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Berbeda dengan PEMILU tahun 1955, yang menggunakan sistem proporsional, maka dalam PEMILU tahun 1971 menggunakan sistem tidak langsung. Dengan sistem ini, maka partai-partai politik yang ada harus memperebutkan perwakilan yang disediakan untuk sesuatu daerah. Suara yang terkumpul di suatu daerah itu tidak dapat dijumlahkan dengan suara partai yang terkumpul di daerah lain. Dan dalam PEMILU tahun 1971 itu, kursi perwakilan yang diperebutkan adalah sebanyak 360 buah, sedangkan

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia
ISSN 2407-7348 *and* ***www.journals.mindamas.com/index.php/sipatahoenan***

100 kursi perwakilan disediakan secara khusus oleh pemerintah Orde Baru untuk kalangan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan non-ABRI, yang keanggotaannya dalam MPRS dilakukan dengan cara pengangkatan oleh Presiden. Dengan demikian, maka seluruh anggota DPR dan MPR itu sebanyak 460 anggota perwakilan (Poerwantana, 1994:78; Liddle, 1992; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Sementara itu, hasil PEMILU tahun 1971, sebagaimana sudah umum diketahui, menunjukkan kemenangan GOLKAR yang meyakinkan, yakni meraih sebanyak 227 kursi atau 62.8 persen. Kemenangan GOLKAR yang cukup mengejutkan itu, pada mulanya, mengundang diskusi dan perdebatan yang sengit, serta tanda tanya besar, baik dari para pengamat di dalam dan di luar negeri. Umumnya, orang menuduh dengan penuh kecurigaan bahwa kemenangan GOLKAR dicapai dengan penuh kecurangan, paksaan, dan/atau menggunakan kekuasaan ABRI (Liddle, 1992; Haris, 1998; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Dalam hal ini, Ali Moertopo, sebagai tokoh paling berperanan dalam kemenangan GOLKAR, melihat kemenangan organisasi yang didukung oleh pemerintah dan ABRI itu sebagai sumber legitimasi bagi Orde Baru. Bagaimanapun, banyak pihak setuju bahwa ABRI dan birokrasi pemerintah merupakan pendukung utama bagi kemenangan GOLKAR dalam PEMILU tahun 1971, di samping juga adanya dukungan dana yang besar, serta intimidasi dan operasi intelijen yang tidak fair (Cahyono, 1992:105; Liddle, 1992; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Dengan mengacu pada hal-hal di atas, maka artikel ini mencoba menganalisis peristiwa-peristiwa di sekitar PEMILU tahun 1971 sebagaimana diberitakan dan ditanggapi oleh pers, dalam hal ini surat kabar. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi surat kabar adalah menyajikan berita tentang kejadian atau peristiwa penting pada zamannya kepada masyarakat, sehingga fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan persoalan elementer seperti "apa yang terjadi, kapan, dimana, dan siapa" dapat ditemukan jawabannya dalam surat kabar (Suwirta, 2000 dan 2017).

Apa yang ingin dikaji dalam studi ini adalah tidak hanya bagaimana peristiwa-peristiwa di sekitar PEMILU tahun 1971 itu dilihat dan diberitakan oleh surat kabar, tetapi juga bagaimana ia ditanggapi dan diberi pandangan oleh surat kabar berkenaan. Tanggapan dan pandangan surat kabar itu, biasanya, tercermin dalam kolom tajuk rencana, catatan pojok, dan karikatur yang disajikan. Ketiga variabel itu (kolom tajuk rencana, catatan pojok, dan karikatur) merupakan jati diri sebuah surat kabar, yang membedakannya dengan surat kabar lain. Dalam hal ini, sajian tajuk rencana, catatan pojok, dan karikatur juga merupakan refleksi dari sikap, pandangan, dan keyakinan para redaktur pers, sebagai pengelola surat kabar yang bersangkutan (Suwirta, 2000 dan 2017; Lesmana, 2001; dan Oetama, 2002).

Apabila diamati secara seksama, dari beberapa literatur yang ada, maka akan terlihat bahwa ternyata media massa banyak memberikan kontribusi terhadap kehidupan politik di suatu negara. Demikian pula apabila dilihat dalam kehidupan politik sehari-hari, ternyata banyak literatur yang secara implisit mencerminkan adanya dua pandangan yang berbeda secara normatif. Pandangan itu sesungguhnya mempersoalkan tentang peranan media massa didalam kehidupan sehari-hari (Sukarna, 1991; Nambo & Puluhuluwa, 2005; dan Bakti & Rosit eds., 2016).

Menurut pandangan *pertama*, media massa diharapkan mampu mengutarakan semua masalah yang oleh masyarakat dianggap penting. *Kedua*, media massa mempunyai kecenderungan besar untuk lebih bersikap sebagai *balancer* (penyeimbang) antara kepentingan media di satu pihak dengan kepentingan publik di pihak lain. Di satu pihak, perkembangan media massa mengikuti arus sistem politik yang ada; sedang pada pihak lain, ia mencoba untuk menempatkan dirinya pada posisi di luar sistem yang ada. Di negara di mana sistem persnya mengikuti sistem

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia

politik yang ada, maka pers atau media massa cenderung bersikap dan bertindak sebagai *balancer* antara kekuatan yang ada (*cf* Suwardi, 1993:25-26; Andrianti, 2015; dan Nashrudin, 2017).

Sebenarnya, ketika menjelang PEMILU tahun 1971, sinisme dan kritik-kritik sosial yang sifatnya kurang sehat memenuhi lembaran-lembaran surat-surat kabar di Indonesia. Secara umum, pers mengeluh karena terlalu kerasnya sensor yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Tetapi, secara khusus, sebenarnya ada fenomena lain, yakni adanya persaingan – baik secara diam-diam maupun terang-terangan – antara koran-koran nasional (koran-koran yang terbit di ibu kota Jakarta) dengan koran-koran daerah atau koran yang terbit di kota-kota penting di Indonesia, selain di Jakarta (Abar, 1991; Liddle, 1992; Haris, 1998; Nisa, Na'im & Umamah, 2017; dan Suwirta, 2018).

Persaingan itu demikian keras dan memuncak dalam usaha merebut pasaran pembaca. Dengan sendirinya, koran-koran nasional yang terbit di Jakarta, dalam hal ini, lebih beruntung karena fasilitas yang tersedia, seperti modal, sumber daya manusia, dan peralatan lebih banyak didapat di Jakarta daripada koran-koran yang ada di daerah. Di samping itu, juga karena persyaratan yang diminta oleh para pembaca lebih meningkat; atau dengan kata lain, pembaca ingin mendapatkan surat kabar yang lebih bermutu, baik dari segi isinya maupun dari segi grafisnya (Taufik, 1977:78; Parker, 2013; dan Zuhra, 2017).

Studi ini, dengan demikian, ingin melihat juga bagaimana surat kabar yang ada di ibu kota Jakarta dan surat kabar yang ada di daerah melihat dan menanggapi peristiwa-peristiwa di sekitar PEMILU tahun 1971 beserta hasil-hasilnya. Adapun alasan pemilihan pada surat kabar *Kompas* di Jakarta dan *Pikiran Rakyat* di Bandung adalah terutama dikarenakan oleh letak asal kedua kota surat kabar itu berlainan. Surat kabar *Kompas,* yang terbit di Jakarta, merupakan salah satu surat kabar ibu kota yang besar dan bersifat nasional; sedangkan surat kabar *Pikiran Rakyat,* yang berlokasi di Bandung, bagaimanapun juga termasuk salah satu surat kabar yang besar dan bersifat kedaerahan, terutama daerah Jawa Barat (Lesmana, 2001; Hill, 2011; dan Prastowo, 2017).

Dalam perspektif komparasi historis, surat kabar *Kompas* yang lahir pada awal Orde Baru (tahun 1965) sampai dengan PEMILU tahun 1971 tidak pernah terkena pembredelan oleh pemerintah Orde Baru (Said, 1988:162; Lesmana, 2001; dan Hill, 2011). Sedangkan surat kabar *Pikiran Rakyat,* yang terbit sejak tahun 1950-an, pernah dilarang terbit oleh pemerintah pada tahun 1965 (Ali, 1995; Iskantini, 2001:7; Suwirta, 2004; dan Prastowo, 2017).

Walaupun begitu harus diakui bahwa kedua koran itu sangat berpengaruh didalam masyarakat, dimana surat kabar tersebut diterbitkan. Jumlah oplah dari kedua surat kabar itu sama-sama tinggi, yaitu untuk *Kompas* di Jakarta pada tahun 1970-an mencapai oplah di atas 100,000 eksemplar; sedangkan untuk *Pikiran Rakyat* di Bandung pada tahun 1970-an mencapai oplah di atas 50,000 eksemplar. Sampai dengan tahun 1980-an, data oplah dari kedua surat kabar itu nampaknya tidak mengalami perubahan yang berarti (Oetama, 2002:38-39; Lesmana, 2001; Suwirta, 2004; Hill, 2011; dan Prastowo, 2017).

Data tentang oplah ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh kedua surat kabar di masing-masing kotanya dalam membentuk pendapat dan mempengaruhi para pembacanya; dan untuk memberikan keputusan kepada siapa suara mereka akan diberikan di saat PEMILU tahun 1971.

Nampaknya belum banyak karya ilmiah yang mengkaji tentang pers dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu dalam sejarah Indonesia modern. Studi yang dilakukan oleh Andi Suwirta (2000), misalnya, memaparkan tentang sikap dan pandangan harian *Merdeka* di Jakarta dan *Kedaulatan Rakyat* di Yogyakarta pada masa-masa awal revolusi Indonesia, tahun 1945-1947. Sementara itu, studinya Ratna Utami (2001) mengupas tentang keberadaan dan peranan surat

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia
ISSN 2407-7348 *and* ***www.journals.mindamas.com/index.php/sipatahoenan***

kabar bulanan *Poetri Mardika* pada masa pergerakan nasional Indonesia, 1915-1920. Studi yang dilakukan oleh Saydah Akla (2007) juga menganalisis tentang keberadaan dan peranan pers dalam kaitannya dengan perkembangan politik di Semarang pada tahun 1912-1930. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Euis Iskantini (2004) mencoba memaparkan tentang pandangan harian umum *Pikiran Rakyat* di Bandung terhadap masalah-masalah politik di Indonesia, dari tahun 1950-1965. Begitu juga dengan kajian-kajian serupa dari para sarjana lain, hingga sekarang ini (*cf* Chaniago *et al.*, 1987; Junaedhie, 1991; Suwirta, 2000; Utami, 2001; Iskantini, 2004; Akla, 2007; Wardani, 2016; dan Limah, Utomo & Suryadi, 2018).

Studi ini, dengan demikian, sekali lagi ingin melihat bagaimana sikap dan pandangan pers, khususnya surat kabar *Kompas* di Jakarta dan *Pikiran Rakyat* di Bandung, dalam menanggapi peristiwa-peristiwa di sekitar PEMILU tahun 1971 pada masa Orde Baru beserta hail-hasilnya. Sikap dan pandangan surat kabar itu biasanya tercermin dari sajian berita, kolom tajuk rencana, dan catatan pojok yang ditampilkan oleh media berkenaan (Suwirta, 2000 dan 2017; Lesmana, 2001; Oetama, 2002; Surjomihardjo ed., 2002; dan Sobur, 2008).

Dengan menggunakan metode sejarah, pendekatan kualitatif, studi literatur, dan analisis yang deskriptif (Gottschalk, 1986; Christine & Holloway, 2008; Zed, 2008; Raco, 2010; dan Sjamsuddin, 2014), artikel ini mengkaji tentang: (1) *Kondisi Politik di Indonesia Menjelang dan pada Saat PEMILU Tahun 1971;* (2) *Harian Kompas di Jakarta dan Pikiran Rakyat di Bandung, serta Pandangan-pandangannya terhadap PEMILU Tahun 1971;* serta (3) *Sikap Pemerintah Orde Baru terhadap Pers dalam PEMILU Tahun 1971.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Politik di Indonesia Menjelang dan pada Saat PEMILU Tahun 1971. Bangsa Indonesia memasuki suatu periode penting dalam kehidupan pemerintah Orde Baru, yang dimulai sejak tahun 1966. Sebagaimana dinyatakan oleh M.C. Ricklefs (1999), dan sarjana lainnya, bahwa selama 18 bulan setelah usaha kudeta yang gagal pada tahun 1965, masa depan politik Indonesia diragukan. Akan tetapi, akhirnya Jenderal Soeharto dan sekutu-sekutunya dapat menegakkan apa yang dikenal sebagai "Orde Baru" untuk membedakannya dari "Orde Lama" pada zaman Soekarno. Selama kurun waktu itu, PKI (Partai Komunis Indonesia) dihancurkan secara fisik dalam ledakan kekerasan politik yang paling hebat semenjak revolusi Indonesia tahun 1945. Pada awal tahun 1967, Jenderal Soeharto merasa bahwa langkah simbolik terakhir dalam mengkonsolidasikan Orde Baru dapat diambil, yakni dengan jalan penyingkiran terhadap Presiden Soekarno (Ricklefs, 1999:432; Adiane, 2014; dan Adam, 2018).

Pada bulan Maret 1967, MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) bersidang. Dalam siding paripurna yang dipimpin oleh Jenderal A.H. (Abdul Haris) Nasution itu Presiden Soekarno dimintai pertanggungjawabannya dalam tiga hal, yaitu: (1) masalah peristiwa G-30-S/PKI, atau Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia, tahun 1965; (2) masalah krisis ekonomi; serta (3) masalah krisis moral dan kepemimpinan. Mengingat Presiden Soekarno dinilai tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan – betapapun sudah dilengkapi dengan PEL-NAWAKSARA (Pelengkap Sembilan Pernyataan) – akhirnya MPRS membebaskan Sukarno dari semua kekuasaan di satu sisi; dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Penjabat Presiden di sisi lain (Ricklefs, 1999; Adiane, 2014; dan Abdulsalam, 2018).[1]

Dengan peristiwa itu, maka secara *de facto* Presiden Soekarno tersingkir dari kekuasaan politik dan dijadikan tahanan

[1]Lihat juga, misalnya, "News: Pidato Pelengkap Nawaksara Presiden Sukarno tentang G30S/PKI" dalam *Kumparan,* pada 19 September 2017. Tersedia secara online juga di: https://kumparan.com/kumparannews/pidato-pelengkap-nawaksara-presiden-sukarno-tentang-g30s-pki [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2018].

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia

rumah dalam isolasi yang sangat pahit di Istana Bogor, dan kemudian mengalami kesepian di rumah istrinya yang orang Jepang, di Wisma Yaso, Jakarta. Tidak tahan dengan kesepian, pengawasan, dan tekanan politik, serta penyakitnya, Soekarno akhirnya meninggal dunia pada bulan Juni 1970 (Ricklefs, 1999; Isnaeni, 2017; dan Raditya, 2018).

Sementara itu, bangsa Indonesia tidak bisa terus-menerus dipimpin oleh seorang Penjabat Presiden, jika ingin segera melaksanakan pembangunan ekonomi yang terencana dan berkelanjutan. Kehidupan sosial dan politik yang sudah relatif kembali tenang, memungkinkan pemerintah Orde Baru, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mencari legitimasi politik, salah satunya melalui mekanisme PEMILU atau Pemilihan Umum (Crouch, 1986; Eriyanto, 2000; McGlynn *et al*. eds., 2007; Hadi & Kasuma, 2012; dan Suwirta, 2018).

Pada bulan Maret 1968, MPRS mengadakan sidang lagi, sidang kelima. Diantara keputusannya yang penting adalah sebagai berikut:

(1) *Tap XLIV/MPRS/1968 jang menetapkan Djenderal Soeharto mendjadi Presiden Republik Indonesia untuk masa 5 tahun (1968–1973).*
(2) *Tap XLI/MPRS/1968 jang menetapkan perlunja dibentuk kabinet pembangunan dengan tugas pokok melaksanakan program jang dikenal sebagai Pantja Krida, jaitu: (1) mentjiptakan stabilitas politik dan ekonomi; (2) menjusun dan melaksanakan Repelita; (3) melaksanakan Pemilu; (4) mengembalikan keamanan dan ketertiban masjarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G-30-S/PKI, menindas setiap penjelewengan terhadap Pantjasila dan UUD 1945; dan (5) melandjutkan penjempurnaan dan pembersihan setjara menjeluruh aparatur negara.*
(3) *Tap XLII/MPRS/1968 jang menetapkan penjelenggaraan Pemilu selambat-lambatnja pada tangga 5 Djuli 1971* (dalam Moedjanto, 1992:151-152).

Dari pernyataan di atas jelas bahwa PEMILU (Pemilihan Umum) adalah salah satu tugas pokok Kabinet Pembangunan dari pemerintah Orde Baru, sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPRS (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) No.XLI/MPRS/1968 dan No.XLII/MPRS/1968. Mengenai pelaksanaan PEMILU diatur dengan UU (Undang-Undang) No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; dan UU No.16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Crouch, 1986; Liddle, 1992; Ricklefs, 1999; Hadi & Kasuma, 2012; dan Suwirta, 2018).

Pemerintah juga, melalui Menteri Dalam Negeri, kemudian menetapkan tanda gambar 10 organisasi politik, termasuk GOLKAR (Golongan Karya), yang ikut dalam PEMILU tahun 1971, melalui proses undian nomor urut tanda gambar. Dengan landasan hukum dan mekanisme politik yang seperti itu, PEMILU tahun 1971 siap untuk dilaksanakan (Setneg RI, 1985:230; Santoso, 2004; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Dalam pada itu, pemerintah Orde Baru, yang didominasi oleh TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat), memang ingin bertindak "konstitusional" dengan cara mendapatkan persetujuan dari lembaga-lembaga yang ditentukan oleh UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Terdorong oleh keinginan untuk menghilangkan kesan bahwa mereka mengambil-alih kekuasaan dari Presiden Soekarno secara tidak sah dan keinginan untuk memenangkan dukungan masyarakat luas, maka para pemimpin TNI-AD tidak berusaha keras menahan tekanan dari partai-partai politik yang ada pada waktu itu untuk mengadakan PEMILU (Crouch, 1986:279; Liddle, 1992; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Hanya saja, pimpinan TNI-AD perlu mencari *partner* organisasi politik yang dapat mengimbangi, bahkan mengatasi, partai-partai politik itu agar proses dan hasil PEMILU tahun 1971 dapat diatur dan dimenangkan oleh pihak pemerintah Orde Baru. Bahwa pimpinan TNI-AD, pada masa-

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia
ISSN 2407-7348 *and* ***www.journals.mindamas.com/index.php/sipatahoenan***

masa awal Orde Baru, kurang bersemangat dan kurang siap untuk menyelenggarakan PEMILU tampak jelas pada bulan Agustus 1966, ketika diadakan Seminar TNI-AD di Bandung, yang diikuti oleh para perwira senior TNI-AD dan para penasihat sipil mereka, untuk merumuskan program-program politiknya (Crouch, 1986:279; Liddle, 1992; Suryadinata, 1992; Riadi, 2013; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Menerima kenyataan bahwa PEMILU harus diadakan sesuai dengan keputusan MPRS pada bulan sebelumnya, Seminar TNI-AD di Bandung antara lain menyatakan persetujuannya di satu sisi; akan tetapi, di sisi lain, disertai dengan syarat "*djelas bahwa kekuatan-kekuatan Pantjasila harus menang dalam PEMILU*". Dan untuk menjamin kemenangan "*kekuatan-kekuatan Pantjasila*" tersebut, seminar kemudian menerima usul untuk menjalankan sistem PEMILU yang diperkirakan akan tidak menguntungkan partai-partai politik yang ada. Dengan perkataan lain, bagi TNI-AD, yang menjadi penopang utama pemerintah Orde Baru, jelas bahwa PEMILU tahun 1971 harus dimenangkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah Orde Baru (*cf* Crouch, 1986:280; Liddle, 1992; Suryadinata, 1992; Puspita, 2012; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa berbeda dengan PEMILU tahun 1955, yang menggunakan sistem proporsional, maka PEMILU tahun 1971 menggunakan sistem distrik. Sistem distrik ini maksudnya adalah bahwa pada setiap distrik, yang merupakan daerah pemilihan, hanya akan diwakili oleh seorang wakil dari peserta partai politik. Sistem ini dimaksudkan juga untuk memudahkan bagi anggota masyarakat dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, calon-calon wakil peserta dari partai politik harus berdomisili atau tinggal di distrik yang bersangkutan, setidak-tidaknya 6 bulan sebelum PEMILU dilaksanakan (Liddle, 1992; Haris, 1998; Feith, 1999; Wardaya, 2004; dan Permadi & Aman, 2014).

Sementara itu, Seminar TNI-AD II tahun 1966 di Bandung mengusulkan agar jangka waktu calon-calon wakil peserta dari partai politik, termasuk GOLKAR, yang tinggal di distrik itu minimal harus satu tahun. Ini dimaksudkan agar mereka dapat mensosialisasikan program-program dan visi politiknya kepada masyarakat luas. Hal yang sesungguhnya terjadi adalah agar wakil-wakil dari GOLKAR dapat mempersiapkan dirinya, dengan didukung oleh birokrasi pemerintah Orde Baru, lebih baik lagi untuk memenangkan PEMILU tahun 1971 (Crouch, 1986:280; Liddle, 1992; Suryadinata, 1992; Puspita, 2012; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Ketika UU PEMILU disahkan pada akhir akhir tahun 1969, terdapat modifikasi dari ketentuan sistem distrik, terutama yang berkenaan dengan banyaknya anggota calon-calon dari wakil partai politik dan adanya larangan terhadap organisasi-organisasi politik baru yang mengidikasikan adanya potensi untuk "melawan" pemerintah. Organisasi politik yang dimaksud, diantaranya, adalah MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), yang kemudian berubah menjadi PARMUSI (Partai Muslimin Indonesia). Dalam konteks ini, pemerintah Orde Baru tidak menghendaki Mr. Mohamad Roem duduk sebagai Ketua PARMUSI, karena sikapnya yang kritis dan bekas pimpinan MASYUMI (Noer, 1987; Gaffar, 1993; dan Andriawan, 2007).

Begitu juga terhadap partai-partai politik lain, seperti PNI (Partai Nasional Indonesia), pemerintah Orde Baru melakukan intervensi untuk memenangkan tokoh-tokoh pemimpin partai agar lebih akomodatif dengan kepentingan politik pemerintah (Rocamora, 1991; Ricklefs, 1999; dan Sitompul, 2017). Namun harus dicatat juga bahwa betapapun pemerintah Orde Baru menghendaki tokoh-tokoh politik yang moderat dan akomodatif, namun Presiden Soeharto sendiri sebenarnya lebih condong pada dukungan kaum modernisator dan profesional di luar partai-partai politik, yang kini bernaung dalam organisasi GOLKAR. Sebagaimana dicatat oleh R. William Liddle (1992), dan sarjana lainnya, bahwa dengan kondisi seperti itu maka GOLKAR merupakan

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia

organisasi politik yang sudah siap untuk mampu bertarung dalam PEMILU tahun 1971, atas nama pemerintah (Liddle, 1992:5; Suryadinata, 1992; Ricklefs, 1999; Riadi, 2013; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Dalam kaitannya dengan PEMILU, pemerintah Orde Baru juga memandang perlu untuk mengatur pers sebagai media yang dapat mempengaruhi opini publik. Pemerintah Orde Baru sangat sadar tentang pentingnya kedudukan dan peranan media massa, sebagaimana telah ditunjukkan oleh surat kabar *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha,* yang didukung oleh TNI-AD. Termasuk juga, dalam konteks pentingnya media massa, peranan RRI (Radio Republik Indonesia) dan TVRI (Televisi Republik Indonesia). Dalam rangka "mengikis habis" sisa-sisa kekuatan Orde Lama, yang tidak sejalan dengan semangat dan kepentingan politik Orde Baru, maka pers yang ada harus dapat dikendalikan dan dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah, dengan cara – sama seperti dalam partai-partai politik – mendukung tokoh-tokoh pers yang akomodatif dan moderat untuk memimpin media massa tersebut (Abar, 1991; Hill, 2011; Hadi & Kasuma, 2012; Parker, 2013; dan Suwirta, 2018).

Harian Kompas di Jakarta dan Pikiran Rakyat di Bandung, serta Pandangan-pandangannya terhadap PEMILU Tahun 1971. Sejarah perkembangan pers di Indonesia, pada awal tahun 1970-an, sepenuhnya berada di bawah kontrol pemerintah Orde Baru, tidak terkecuali dengan surat kabar *Kompas* di Jakarta dan *Pikiran Rakyat* di Bandung. Dua surat kabar ini, bagaimanapun, memang tidak ada kaitannya langsung dengan partai-partai politik yang ada. Namun, secara historis dan ideologis, surat kabar *Kompas* adalah bagian dari media massa yang menyuarakan pandangan dan kepentingan politik golongan Kristen Katholik di Indonesia. Plesetan bagi *Kompas*, yang berarti "Komando Pastur", menunjukkan arah dan gejala tersebut, betapapun para pemimpin Redaksinya – dalam hal ini P.K. (Petrus Kanisius) Ojong dan Jacob Oetama – berusaha menunjukkan sikap netral dan inklusif kepada para pembacanya (Hill, 2011; Alam, 2012; dan Galih, 2016).

Di mata pemerintah Orde Baru sendiri, surat kabar *Kompas* ini dinilai "baik" dan "anak manis" karena, betapapun didirikan pada bulan Juni 1965 pada masa pemerintahan Soekarno, dalam perkembangan selanjutnya lebih menyuarakan pandangan dan kepentingan tentang perlunya pembaharuan daripada ideologi-ideologi partai politik yang lama (Lesmana, 2001; Hill, 2011; dan Galih, 2016).

Sementara itu di Bandung, harian *Pikiran Rakyat,* yang lahir pada tahun 1950, harus berhenti terbit pada akhir tahun 1965. Pada waktu itu, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan setiap surat kabar untuk berafiliasi kepada surat kabar partai politik atau surat kabar pemerintah, termasuk dalam hal ini surat kabar milik tentara. Karena *Pikiran Rakyat* di Bandung merupakan surat kabar yang *independent*, dalam artian tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu – betapapun pandangan-pandangannya bersifat nasionalis dan condong ke Soekarnoisme – maka terjadi friksi diantara pimpinan redaksi pada masa-masa awal Orde Baru. Dalam hal ini antara pihak Direksi dan Redaksi harian *Pikiran Rakyat* tidak ada kesamaan pendapat dan kesepakatan. Hal ini sesungguhnya merupakan refleksi dari dinamika politik dan perubahan zaman. *Pikiran Rakyat* versi lama hanya mampu bertahan hidup dari tahun 1950 hingga 1965, sedangkan *Pikiran Rakyat* versi baru bisa bertahan hidup dari tahun 1966 hingga sekarang (Ali, 1995; Iskantini, 2001; Suwirta, 2004; Hill, 2011; dan wawancara dengan Atang Ruswita, 24/3/2001).

Dalam hal ini, pihak Direksi yang diwakili oleh Djamal Ali dan Asmara Hadi (dua tokoh yang nasionalis dan Soekarnois) tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa *Pikiran Rakyat* harus tetap menjadi surat kabar yang independen dan menolak untuk bergabung dengan kekuatan politik manapun, termasuk kepentingan politik dari TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia
ISSN 2407-7348 *and* ***www.journals.mindamas.com/index.php/sipatahoenan***

– Angkatan Darat). Dengan begitu, maka *Pikiran Rakyat* lebih baik mati untuk selama-lamanya daripada harus tunduk kepada kepentingan politik manapun (Ali, 1995:60; Iskantini, 2001; dan Suwirta, 2004).

Sedangkan pihak Redaksi lainnya, terutama diwakili oleh Sakti Alamsyah dan Atang Ruswita (dua tokoh pendiri *Pikiran Rakyat* versi baru), lebih memilih bersikap akomodarif dan moderat, serta tidak ingin *Pikiran Rakyat* mati sia-sia. Karena itu, mereka kemudian menerima tawaran dari Panglima Tentara Siliwangi, Ibrahim Adjie, untuk menerbitkan sebuah surat kabar yang berafiliasi dengan TNI-AD, yaitu *Angkatan Bersendjata Edisi Djawa Barat*. Surat kabar ini, kemudian, pada tanggal 24 Maret 1966, berubah kembali namanya menjadi Harian Umum *Pikiran Rakyat* di Bandung (Said, 1988:164; Iskantini, 2001:55; Suwirta, 2004; Hill, 2011; dan Prastowo, 2017).

Pada tahun 1967, peraturan tentang perlunya surat kabar harus berafiliasi dengan kekuatan partai politik tertentu itu dicabut. Hal ini dimaksudkan justru agar media massa yang ada tidak menjadi bagian yang terpisahkan dan corong belaka dari partai-partai politik. Pemerintah Orde Baru menghendaki agar pers yang relatif independen dibiarkan hidup dan berkembang, asalkan sejalan dengan pandangan dan kepentingan politik pemerintah (Iskantini, 2001; Suwirta, 2004; dan Prastowo, 2017).

Dalam hal ini, Panglima Tentara Siliwangi di Jawa Barat pun mengeluarkan peraturan untuk melepaskan patronase terhadap harian *Pikiran Rakyat,* namun tetap memiliki hubungan emosional dan pemikiran yang sama tentang visi dan misi yang baru, sesuai dengan semangat pembangunan Orde Baru. Jika tentara Siliwangi mengklaim dirinya sebagai representasi dari tentaranya masyarakat Jawa Barat, maka surat kabar *Pikiran Rakyat* di Bandung pun ingin mencoba menjembatani antara keinginan masyarakat dan pemerintah, serta berusaha menanamkan *sense of belonging* bahwa *Pikiran Rakyat* adalah penyambung lidah dan milik masyarakat Jawa Barat (Iskantini, 2001; Surjomihardjo ed., 2002; Suwirta, 2004; Hill, 2011; dan Prastowo, 2017).

Kehidupan pers pada masa Orde Baru memasuki periode penting pada tahun 1969. Pada tahun tersebut pemerintah mengeluarkan tiga peraturan tentang pers, masing-masing menyangkut syarat-syarat perusahaan pers, menjadi wartawan, dan persyaratan memperoleh SIT (Surat Izin Terbit). Peraturan-pertauran ini jelas merupakan *modus operandi* baru dalam rangka usaha pemerintah untuk mengontrol sepenuhnya kehidupan dan pandangan pers di Indonesia (Lesmana, 2001:198; Hill, 2011; dan Baskoro, 2018).

Syarat-syarat untuk memperoleh SIT, misalnya, jelas ditentukan sepenuhnya oleh kemauan dan kepentingan politik pemerintah. Bahkan untuk menjadi seorang wartawan pun, pemerintah mengaturnya dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus merupakan anggota dari organisasi pers yang diakui dan disetujui eksistensinya oleh pemerintah di Indonesia (Surjomihardjo ed., 2002; Hill, 2011; dan Baskoro, 2018).

Kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengatur tentang pers, terutama tentang kedudukan dan peranan wartawan, banyak mendapat tanggapan dari kalangan pers sendiri. Dalam pandangan pers, peraturan itu sangat membatasi kebebasan individu untuk menentukan profesi dan memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Adalah menarik pernyataan surat kabar *Kompas* di Jakarta dalam menanggapi peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mengontrol pers, tidak hanya lembaganya tetapi juga wartawannya. Peraturan tentang pers yang masih diperdebatkan secara kritis pada tahun 1970-an itu mendapat tanggapan surat kabar *Kompas,* sebagai berikut:

> *[...] Kebebasan pers ini pada dasarnya adalah kebebasan individu, hak-hak asasi manusia. Salah satu hak asasi adalah hak untuk berserikat atau tidak berserikat.*
>
> *Dalam keputusan Menpen [Menteri Penerangan] itu terkandung unsur paksaan: kalau mau diakui sebagai wartawan,*

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia

> *seseorang harus menjadi anggota organisasi wartawan. Bukan sembarang organisasi wartawan, melainkan organisasi wartawan yang disahkan oleh pemerintah.*
>
> *Unsur paksaan dalam pembinaan ini apakah tidak bertentangan dengan hak asasi, dasar dari kemerdekaan pers itu sendiri? Inilah rupanya sebab pokok, mengapa timbul reaksi menentang terhadap keputusan Menpen!* (Tajuk Rencana *Kompas*, 6 Mei 1976).

Apa yang disuarakan oleh surat kabar *Kompas* di Jakarta tersebut, mengenai pentingnya kebebasan dan hak asasi manusia, dianggap angin lalu oleh pemerintah Orde Baru. Dalam pandangan pemerintah, konsep "kebebasan" itu harus disertai dengan "tanggung jawab". Dan yang dimaksud dengan "tanggung jawab pers", termasuk para wartawannya, harus ditunjukkan kepada pemerintah yang sedang melaksanakan pembangunan dan modernisasi di segala bidang. Dengan perkataan lain, demi pembangunan dan modernisasi maka kebebasan pers bisa dibatasi. Dan yang harus diutamakan adalah peranan dan tanggung jawab pers untuk bersama-sama pemerintah mensukseskan proses dan hasil-hasil pembangunan. Dalam konteks ini bisa difahami mengapa kemudian sikap dan pandangan pers dalam menanggapi kebijakan dan program-program politik pemerintah Orde Baru, termasuk surat kabar *Kompas* di Jakarta dan *Pikiran Rakyat* di Bandung, lebih bersifat moderat dan akomodatif (Lesmana, 2001; Suwirta, 2004; Hill, 2011; Galih, 2016; dan Prastowo, 2017).

Begitu juga dengan corak pemberitaan dan pandangan pers terhadap persiapan dan pelaksanaan PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1971. Menjelang PEMILU pada tanggal 3 Juli 1971, misalnya, diberitakan dalam surat kabar *Kompas* bahwa segala aparat keamanan negara yang berkait sudah siap-siaga, terutama di daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta. Juga disebutkan bahwa dalam menghadapi PEMILU, masyarakat telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, malah sampai kepada persediaan bahan-bahan pokok untuk keperluan di dapur. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya dari masyarakat dalam rangka menyiapkan rasa aman dan nyaman di hari pelaksanaan PEMILU nanti. Berikut adalah kutipan tajuk rencana *Kompas* yang berjudul "Semua Aman":

> *Menghadapi hari Pemilu 3 Djuli, kita mendapat kesan, alat-alat keamanan sudah siap siaga. Bahkan pada hari terachir ini, kita menjaksikan berbagai udjian keamanan, misalnja inspeksi Wapangab [Wakil Panglima Angkatan Bersendjata] Djendral Panggabean ke Kodam V Djaja [Komando Daerah Militer V Djakarta Raja].*
>
> *Kita mendapat kesan, petugas-petugas keamanan memang berlaku ungkapan "lebih baik mentjegah daripada memadamkan". Mudah-mudahan, semua tindakan preventif itu memberikan rasa aman kepada masjarakat.*
>
> *Mudah-mudahan terbantahlah desas-desus, seakan-akan untuk menghadapi 3 Djuli, kita perlu persediaan beras, minjak tanah, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Kitapun berpendapat, desas-desus jang meributkan kaum ibu itu tidak ada dasarnja.*
>
> *Mungkin sadja, mendjelang 3 Djuli dan 2/3 hari sesudahnja harga-harga telor dan sajuran naik. Kalau itu terdjadi, sebabnja bukan lain ketjuali karena para pedagang telor dan sajuran pada hari itu tidak dinas. Mereka mudik untuk ikut njoblos pada tanggal 3 Djuli.*
>
> *Kita hormati tindakan-tindakan preventif alat-alat keamanan kita. Kitapun berpendapat lebih baik mentjegah daripada memperbaiki setelah terdjadi. Tapi sebaliknja, kita djuga pertjaja, perkembangan masjarakat kita sudah cukup tinggi.*
>
> *Jah. Perkembangan masjarakat Indonesia sudah memadai kalau hanja untuk menghadapi suasana Pemilu. Tanggung djawab pun umumnja ada dalam bidang ini, rasanja masjarakat kita sudah bisa mengatur dirinja sendiri.*
>
> *"Kelompok strategis" jang bersama-sama dengan elemen Orde Baru lainnja membangun aliansi bagi otoritarianisme baru"* (Tajuk Rencana *Kompas*, 1 Juli 1971).

Para pembaca yang menyimak tajuk rencana tersebut akan merasa kering dan bosan, karena surat kabar *Kompas* kurang greget dalam menanggapi suatu peristiwa politik penting, seperti PEMILU (Pemilihan Umum), pada masa Orde Baru. Nampaknya, kita tidak boleh membaca tajuk rencana *Kompas* di atas hanya apa yang tersurat saja, yang mengandung

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia
ISSN 2407-7348 *and* ***www.journals.mindamas.com/index.php/sipatahoenan***

kesan memuji-muji pemerintah karena telah memberikan "rasa aman" kepada masyarakat. Lebih penting adalah menandai pernyataan "tersurat" namun punya makna tersirat yang mendalam serta memiliki dimensi kritik sosial yang luas, yang akan merupakan ciri khas dari pandangan pers Indonesia pada masa Orde Baru (Lesmana, 2001; Hill, 2011; dan Baskoro, 2018).

Pendekatan keamanan (*security approach*) berlebihan yang diterapkan oleh TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat), seolah-olah negara ini mau menghadapi perang dalam rangka PEMILU, dan ketidakpercayaan pemerintah kepada sikap dewasa dan matang secara politik dari masyarakat, jelas merupakan hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh surat kabar *Kompas* di Jakarta. Dan pada bagian akhir dari tajuk tersebut, *Kompas* jelas-jelas menyatakan bahwa mereka yang tergabung dalam "kelompok strategis" Orde Baru serta mendukung kebijakan "pendekatan keamanan" yang berlebihan itu sebagai telah menciptakan "otoriterisme baru" (*cf* Tajuk Rencana *Kompas*, 1/7/1971; Eriyanto, 2000; Lesmana, 2001; Hill, 2011; dan Hadi & Kasuma, 2012).

Memahami kritik-kritik sosial dari pers pada masa Orde Baru bisa dilihat juga dari sajian catatan pojoknya yang singkat dan padat, namun berisi komentar-komentar yang segar, menggelitik, dan cerdas (Makah, 1977; Sobur, 2008; dan Suwirta, 2017). Dalam hal ini penjaga kolom catatan pojok *Kompas,* "Mang Usil" termasuk dalam kategori tersebut. Dalam mengomentari sekitar pesiapan PEMILU dan peristiwa-peristiwa penting lainnya pada bulan Juni 1971, "Mang Usil"-nya *Kompas* menyatakan sebagai berikut:

> *Mang Usil pikir ada baiknja anda diperingatkan, apakah sudah menerima surat panggilan untuk memilih tanggal 3 Djuli nanti!*
> *Kalau belum, masih bisa diurus. Kalau sudah disimpan baik-baik, djangan sampai terselip hilang.*
>
> Presiden mengulangi lagi, agar perusahaan-perusahaan di lingkungan departemen-departemen melunasi hutang padjaknya!
> *Mang Usil pertjaja, pimpinan PN-PN jang belum melunasi padjaknja takkan berani lagi hidup bermewah-mewah. Masih punja hutang kok!*
>
> Sekdjend PBB, U Thant, istirahat di Pulau Bermuda.
> *Mang Usil harap U Thant lantas tambah muda.*
>
> Rokok-rokok tanpa banderol jang disita polisi dan bea tjukai akan dilelang, djika tak dibajar tjukainja oleh para pemiliknja.
> *Mang Usil pikir dilelang memang lebih baik daripada dibakar* (Catatan Pojok *Kompas,* 1 Juli 1971).

Khusus komentarnya mengenai persiapan PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1971, "Mang Usil"-nya *Kompas* benar-benar "usil" karena penggunaan kata-kata seperti: "surat panggilan", "masih bisa diurus", "disimpan baik-baik", dan "djangan sampai terselip hilang". Hal itu menunjukkan adanya gejala dalam dua hal. *Pertama*, persiapan PEMILU seperti dipaksakan oleh pemerintah Orde Baru. Dengan dalih untuk mencari legitimasi kekuasaan dan perlunya partisipasi dalam pembangunan politik, maka anggota masyarakat didata, didaftar, dipanggil, dan diawasi supaya mencoblos tanda gambar organisasi politik tertentu. *Kedua*, masyarakat sendiri sangat boleh jadi apatis melihat cara-cara pemerintah Orde Baru merekayasa persiapan dan jalannya PEMILU tahun 1971 itu (*cf* Catatan Pojok *Kompas,* 1/7/1971; McGlynn *et al*. eds., 2007; Hill, 2011; Parker, 2013; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Sementara itu, surat kabar *Pikiran Rakyat* di Bandung lebih menyoroti adanya penyalahgunaan kekuasaan dan dana oleh pejabat pemerintah dalam rangka persiapan dan pelaksanaan PEMILU tahun 1971. Diberitakan oleh *Pikiran Rakyat* bahwa dana PEMILU itu diperoleh, sebagian, dari penyalahgunaan jabatan di PLN (Perusahaan Listrik Negara). Kemudian penunggu kolom catatan pojok *Pikiran Rakyat,* "Ole-ole Si Kabajan" berkomentar sengit, seperti berikut:

> Menteri Sutami akan menindak oknum jang tjari dana Pemilu di PLN.

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia

> *Tjari dana ja tjari. Tapi djangan dengan tjara salah gunakan kedudukan dan wewenang, dong ...!* (Catatan Pojok *Pikiran Rakyat,* 9 Juli 1971).

Mengenai pelaksaan PEMILU (Pemilihan Umum) itu sendiri, pada tanggal 3 Juli 1971, baik surat kabar *Kompas* di Jakarta maupun *Pikiran Rakyat* di Bandung, baru memberikan pandangan setelah peristiwanya berlalu beberapa hari. Dalam tajuk rencananya yang berjudul "Kita Pudji Kesadaran Masjarakat", surat kabar *Kompas* di Jakarta memberikan pandangan tentang situasi dan saat PEMILU tanggal 3 Juli 1971 itu, sebagai berikut:

> *Presiden Soeharto, Mentri Amir Machmud, dan para pedjabat terkesan oleh Pemilu jang berdjalan lantjar dan tertib.*
> *Menurut laporan jang diterima oleh Mendagri daripada Gubernur se Indonesia, selaku ketua panitia pemilihan daerah, di daerah-daerah pun berdjalan lantjar dan tepat.*
> *Kepada siapa pudjian harus diberikan bahwa Pemilu berdjalan lantjar dan tertib? Para petugas keamanan nistjaja memberikan sumbangannja.*
> *Tak dapat disangsikan, rakjat banjak, masjarakat, besar pula sumbangannja. Dibuktikan lagi, kesadaran berpolitik secara tertib sudah tinggi pada masjarakat kita.*
> *Dalam persoalan-persoalan kemasjarakatan jang menjangkut peri kehidupannja setjara individuil dan setjara kolektif, masjarakat kita sudah mampu berfungsi sendiri. Hendaknja keadaan ini terus didjadikan pegangan oleh para penguasa, sehingga tidak perlulah tindakan-tindakan jang memberikan kesan "over acting".*
> *Menurut hemat kita, jang terutama diperlukan oleh rakjat banjak dalam kehidupan bermasjarakat ialah arah, orientasi, dan teladan.*
> *Disini letak peranan para pemimpin kelompok-kelompok masjarakat dan para penguasa. Memberikan arah jang benar, orientasi jang menuju pada kesedjahteraan, dan teladan* (Tajuk Rencana *Kompas*, 5 Juli 1971).

Kata-kata kunci untuk memahami tajuk *Kompas* di atas adalah: (1) bahwa masyarakat sebenarrya sudah dewasa dan memiliki kesadaran politik yang tinggi; (2) masyarakat tidak perlu dipaksa-paksa oleh aparat keamanan dan pejabat, sehingga menimbulkan sikap melampaui batas atau *over acting*; serta (3) perlu arah, orientasi, dan teladan yang baik dari para pejabat pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan politik. Hal-hal tersebut di atas, dalam pandangan surat kabar *Kompas* di Jakarta, secara tersirat, masih belum terwujud dalam kenyataan politik di Indonesia (*cf* Tajuk Rencana *Kompas*, 5/7/1971; Siagian, 1986; Mallarangeng, 1992; Lesmana, 2001; dan Alam, 2012).

Sementara itu, pandangan surat kabar *Pikiran Rakyat* di Bandung tentang pelaksanaan PEMILU (Pemilihan Umum), pada tanggal 3 Juli 1971, lebih moderat dan memuji-muji pihak pemerintah dan aparat keamanan negara. Walaupun begitu, ada juga sedikit kritiknya, yaitu terutama berkenaan dengan persiapan PEMILU yang kurang mulus dan hasil PEMILU yang harus disadari oleh para elite politik di negeri ini sebagai tanggung jawab besar untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia melalui proses pembangunan. Perhatikan kutipan panjang dari tajuk rencana *Pikiran Rakyat* di Bandung yang berjudul "Alhamdulillah", berikut ini:

> *Pemilu 1971 kita selenggarakan untuk lebih memantapkan situasi dan kondisi jang telah stabil serta lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan.*
> *Aman, tertib, dan tjukup lantjar pelaksanaan Pemilu pada tanggal 3 Djuli 1971 di daerah Djabar sepandjang laporan jang kita terima, baik dari para pedjabat maupun dari wartawan-wartawan kita sendiri. Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, rakjat melaksanakan hak pilihnja. Kechawatiran sementara pihak tentang akan adanja penekanan-penekanan terhadap rakjat pemilih, Insja Allah telah terbukti sebagai kechawatiran jang memang sebenarnja tidak perlu ada.*
> *Kita bersjukur kehadirat Allah SWT, kita hargai sikap para pemilih jang penuh disiplin dan tanggung djawab telah menggunakan hak pilihnja dengan tertib. Kita sampaikan salut kepada para petugas pemilihan – mulai dari KPPS sampai ke atas – atas kesungguhan mereka melaksanakan tugasnja; mereka tidak mengenal lelah. Mereka tidak mengenal panas ataupun hudjan.*

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia
ISSN 2407-7348 *and* ***www.journals.mindamas.com/index.php/sipatahoenan***

Kita sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada POLRI, HANSIP/ WANRA, dan PRAMUKA jang telah dengan baik melaksanakan tugas pengamanan langsung Pemilu. Djuga kepada ABRI jang dengan baik pula telah melaksanakan tugas pengamanan tidak langsung.

Sampai di sini kita sudah bisa berkata: tidak sia-sia kiranja pemerintah mengeluarkan 20 miljar Rupiah uang untuk membiajai Pemilu ini. Ada memang beberapa kekurangan, terutama dalam pelaksanaan persiapannja. Tapi sebegitu djauh Pemilu sudah bisa terlaksana dengan aman, tertib, dan lantjar.

Alhamdulillah! Satu tugas nasional telah bisa kita laksanakan. Tapi Pemilu bukan hanja satu-satunja tugas nasional. Masih ada tugas nasional lainnja. Dan Pemilu kita adakan djustru dalam rangka ichtiar kita untuk melaksanakan tugas nasional itu dengan sebaik-baiknja, jakni mewudjudkan hidup dan kehidupan jang aman, tentram, sedjahtera lahir bathin setjara adil dan merata.

Untuk mewudjudkan hidup dan kehidupan jang demikian tadi, sedjak kira-kira 2 tahun jl. kita telah mulai melaksanakan Pelita tahap I, jang sebelumnja telah kita dahului dengan usaha-usaha mentjiptakan stabilisasi di bidang politik dan ekonomi. Hasil-hasil dari usaha-usaha stabilisasi dan pelaksanaan Pelita tadi sudah mulai dirasakan manfaatnja oleh rakjat banjak.

Pemilu tanggal 3 Djuli 1971, kita selenggarakan untuk lebih memantapkan stabilisasi politik, ekonomi, sosial jang telah mulai berhasil kita tjiptakan, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Pelita tahap I dan tahap-tahap berikutnja.

Kita belum lagi tahu golongan mana jang akan berhasil menduduki kursi paling banjak di MPR, DPR, DPRD tingakt I dan tingkat II berdasarkan hasil Pemilu 1971. Tapi seperti ditandaskan Gubernur Solichin, menang dalam Pemilu bukan seperti menang dalam djudi. Hasil kemenangan dalam perdjudian adalah untuk kepentingan diri sendiri. Hasil kemenangan dalam Pemilu bukan untuk kepentingan golongan sendiri, melainkan untuk kepentingan seluruh bangsa. Dan benar pulalah apa jang ditandaskan golongan-golongan jang tipis kemenangannja, tetap sama pula tanggung djawab. Bedanja ialah semakin besar kemenangan suatu golongan, maka besar dan berat tanggung djawabnja.

Tjekak-aosnja: setiap mereka nanti duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakjat haruslah senantiasa mentjamkan dalam dirinja kesadaran, bahwa mereka dipilih oleh rakjat untuk memantapkan stabilisasi di semua bidang dan lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan. Mereka dipilih bukan untuk menimbulkan lagi situasi dan kondisi jang penuh dengan pertentangan, ketegangan, dan kekatjauan. Mereka dipilih untuk melandjutkan setjara lebih mantap pelaksanaan pembangunan dalam rangka ichtiar mewudjudkan hidup dan kehidupan jang aman, tentram, sedjahtera lahir bathin secara adil dan merata. Mereka dipilih bukan untuk menghambat pelaksanaan pembangunan jang sudah mulai berdjalan, serta bukan untuk memporak-porandakan kembali hasil jang telah ditjapai (Tajuk Rencana *Pikiran Rakyat*, 5 Juli 1971).

Mengenai hasil PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1971, surat kabar *Kompas* di Jakarta memberikan pandangan secara panjang-lebar dalam tajuk rencananya yang berjudul "Hasil Pemilu Apa?", sebagai berikut:

Hasil Pemilu belum seluruhnja masuk. Tetapi gambaran pokok sudah kita peroleh. Bahwa Golkar menang, itu sudah diduga sebelumnja.

Jang mungkin diluar dugaan adalah besarnja kemenangan. Setjara konservatif, bisa dikatakan rata-rata Golkar memperoleh lebih dari 60%. Ditambah dengan 100 (kira-kira 20 pct) anggota jang diangkat, berarti majoritas Golkar di lembaga-lembaga perwakilan mutlak. Sekitar 80% atau tarohlah 70% itupun sudah majoritas jang menentukan.

Ini berarti, paling tidak setjara formil, stabilitas politik terdjamin, bahkan mantap sekali.

Golkar tidak punja program sendiri. Program Golkar adalah program pemerintah. Kemenangan Golkar berarti diteruskannja program pemerintah, bahkan diteruskan dengan lebih leluasa.

Ini djuga berarti kepemimpinan nasional Presiden Soeharto dilandjutkan setelah 1973.

Hasil Pemilu, dengan kata lain, memberikan kepastian tentang dilandjutkannja projek pembangunan dan kepemimpinan nasional. Ini penting untuk mentjiptakan iklim kerdja, baik di dalam negeri maupun dalam hubungannja dengan luar negeri.

Apakah diluar lembaga perwakilan, Golkar djuga akan bisa berperanan memupuk solidaritas, mendorong partisipasi, dan mendjiwai perubahan struktur politik? Itu termasuk tugas mereka. Dasar eksistensi mereka.

Kita belum tahu, apa jang akan dilakukan oleh partai-partai? Terutama partai-partai jang memperoleh suara sedikit, apakah

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia

> *mereka lantas akan menggabung? Partai-partai besarpun belum djelas posisinja. Turut aktif dalam pemerintahan? Ataukah berfungsi sebagai pengontrol jang baik?*
>
> *Menurut perkiraan, keadaan partai-partai akan seperti sekarang ini. Ja ikut dalam pemerintahan setjara simbolis, ja melakukan kontrol. Kontrol ini kalau mau efektif harus ditingkatkan. Partai-partai harus mampu mengimbangi keahlian tim pemerintah.*
>
> *Setjara sendiri-sendiri, partai-partai tidak memiliki keahlian itu. Setjara bersama-sama, setjara kelompok, tim ahli sematjam itu dapat ditumbuhkan oleh partai-partai. Makna modernisasi partai diantaranja terletak di sini. Pemerintahan Soeharto bertambah kuat. Apa jang diharapkan oleh masjarakat demi semakin berhasilnja pembangunan itu sendiri?*
>
> *Pemerintah akan lebih pasti dalam kebidjaksanaan-kebidjaksanaannja, pemerintah akan lebih leluasa mengadakan penertiban dan pembersihan ke dalam aparatnja, sehingga hambatan pembangunan dari dalam terkikis.*
>
> *Karena lebih pasti akan dirinja, pemerintah djuga harus lebih terbuka untuk kontrol dan koreksi. Hanja dengan demikian, kekuasaan jang kuat ditjegah dari kecenderungan bersalah guna.*
>
> *Kita jang melihat perlunja kemantapan kekuasaan pemerintah untuk membangun, kita djuga melihat perlunja kekuasaan jang makin teguh itu tetap terbuka untuk saran-saran dan koreksi. Semakin kuat, semakin berdjiwa besar.*
>
> *Apakah kontrol pers efektif, ketjuali ditentukan oleh keterbukaan penguasa, djuga dipengaruhi oleh pers sendiri. Lebih teliti dalam pemberitaan, lebih seimbang dan proporsionil, lebih dewasa, lebih "ahli" dalam bidang-bidang jang dikontrolnja* (Tajuk Rencana *Kompas*, 6 Juli 1971).

Kalau dibaca secara seksama tajuk rencana *Kompas* di atas, ternyata surat kabar ini lebih kritis pandangan-pandangannya bila dibandingkan dengan surat kabar *Pikiran Rakyat* di Bandung. Pada awal tahun 1970-an, surat kabar *Kompas* di Jakarta sudah mengingatkan banyak pihak tentang semakin menguatnya gejala "hegemoni politik, otoriterisme, dan tidak profesional", baik di kalangan pemerintah maupun partai-partai politik. Cara yang dikehendaki oleh *Kompas,* untuk mengimbangi gejala tidak sehat tersebut, adalah dengan memberikan ruang kebebasan yang besar kepada media massa dan masyarakat untuk memberikan kritik dan kontrol sosial kepada pemerintah. Betapapun corak bahasa yang digunakan oleh *Kompas* itu terkesan hati-hati dan santun, namun surat kabar ini, terutama di bawah kepemimpinan P.K. (Petrus Kanisius) Ojong, masih memiliki sikap kritis dan tajam pandangannya bila dibandingkan dengan *Pikiran Rakyat* di Bandung (*cf* Mallarangeng, 1992; Lesmana, 2001; Suwirta, 2004; Galih, 2016; dan Prastowo, 2017).

Pandangan surat kabar *Pikiran Rakyat* di Bandung tentang hasil PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1971, yang dimenangkan oleh GOLKAR (Golongan Karya), hanya menyatakan bahwa kemenanga itu adalah juga tanggung jawab yang besar. Perhatikan catatan pojok "Ole-ole Si Kabajan"-nya, berikut ini:

> Pemilihan Umum telah terlaksana dengan selamat. Alhamdulillah ...! Golkar di Djawa Barat, dan di banjak daerah lainnja di tanah air, Golkar leading.
>
> *Kepercatjaan berarti tanggung djawab ....!* (Catatan Pojok *Pikiran Rakyat,* 5 Juli 1971).

Coba bandingkan dengan catatan pojok surat kabar *Kompas* di Jakarta, "Mang Usil", yang mengomentari banyak hal tentang kemenangan GOLKAR (Golongan Karya) dalam PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1971 itu.

> Golkar menangnja nggak tanggung-tanggung!
>
> *Mang Usil pikir itu berarti tanggung djawab Golkar untuk kerdja keras bagi kemakmuran dan keadilan orang banjak juga kagak tanggung-tanggung!*

> Menurut Menpen Malaysia, Pemilu 3 Djuli 1971, "Litjin"!
>
> *Mang Usil pikir, maksudnja tentulah lantjar, bukannja litjin sehingga orang pada djatuh.*

> Ibu Tien Soeharto, waktu nusuk berpakaian lurik!
>
> *Menurut Mang Usil, malah makin luwes lho, mudah-mudahan lurik buatan dalam negeri mendjadi mode lagi, seperti beberapa waktu yang lalu* (Catatan Pojok *Kompas,* 6 Juli 1971).

Sementara itu pada keesokan harinya, tanggal 7 Juli 1971, surat kabar *Kompas* di Jakarta masih terus menanggapi tentang

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia
ISSN 2407-7348 *and* ***www.journals.mindamas.com/index.php/sipatahoenan***

kemenangan GOLKAR (Golongan Karya) pada PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1971. Perhatikan catatan pojok "Mang Usil" yang dimuat dalam surat kabar *Kompas,* berikut ini:

> Menpen Malaysia ini boleh djuga komentar-komentarnja! Tentang hasil Pemilu ia bilang: Ini adalah kisah harapan, bukan kisah putus asa!
> *Mang Usil setudju, harapan perbaikan nasib rakjat banjak dengan kerdja keras lagi djudjur.*
>
> Menyaksikan kemenangan jang luar biasa, berbagai pemuka Golkar bilang: Sungguh besar tanggung djawab kita!
> *Mang Usil pikir, itu reaksi jang tepat. Kemenangan bawa tanggung djawab besar, besar sekali. Harapan dan kepertjayaan rakjat tidak boleh diketjewakan.*
>
> Apabila nanti tiba saatnja membagi kursi, para pemimpin itu nistjaja ingat djandji kampanje jang umumnja berbunji: "Kami berdjuang demi kemakmuran rakjat banjak!"
> *Mang Usil pikir baik djuga djauh-djauh hari sudah diingatkan* (Catatan Pojok *Kompas,* 7 Juli 1971).

Surat kabar *Pikiran Rakyat* di Bandung, setelah PEMILU (Pemilihan Umum) berlalu, justru hanya memberikan pandangan tentang perlunya partai-partai politik membersihkan tanda-tanda gambar kontestan dari penglihatan publik, sesuai dengan anjuran pemerintah – dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. Perhatikan catatan pojok "Ole-ole Si Kabajan" dalam surat kabar *Pikiran Rakyat*, berikut ini:

> Tjutju-tjutju Si Kabajan jang mulutnja begitu usil melaporkan bahwa sampai kemarin siang masih ada beberapa tanda gambar jang belum di turunkan dari tempat peragaannja untuk disimpan di tempatnja oleh jang punja.
> *Si Kabajan djelas tidak bisa kasih komentar terhadap laporan tjutjunja, ketjuali hanja mengingatkan pada pengumuman Mendagri Amir Machmud, bahwa selambat-lambatnja tanggal 10 Djuli, semua tanda-tanda peragaan kampanje Pemilu sudah harus hilang dari tempat-tempat penempelannja* (Catatan Pojok *Pikiran Rakyat*, 8 Juli 1971).

Kemenangan GOLKAR (Golongan Karya) dalam PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1971 memang sudah diperkirakan sebelumnya oleh banyak kalangan. Hal itu disebabkan, di antaranya, bukan saja karena usaha yang dilakukan oleh para kader atau partisipan GOLKAR cukup militan, tetapi yang lebih penting lagi karena dukungan yang diberikan oleh birokrasi (mulai dari pejabat di Pusat hingga Daerah) serta ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Dengan mesin politik yang begitu kuat dan solid, GOLKAR dapat meraih suara lebih dari 60% dan nampaknya sulit ditandingi oleh partai-partai politik lain, termasuk dalam PEMILU-PEMILU Orde Baru selanjutnya (Liddle, 1992; Suryadinata, 1992; Puspita, 2012; Riadi, 2013; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Sumber dana GOLKAR juga melimpah. Janji-janji politiknya selama kampanye PEMILU tahun 1971 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan disertai dengan bantuan materi, menjadikan GOLKAR lebih menarik perhatian masyarakat daripada partai-partai politik yang lain. Namun, kemenangan GOLKAR dalam PEMILU tahun 1971 itu sebenarnya menuai banyak protes dan kritikan dari masyarakat luas. Politik "bulldozer" yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud dan sikap "over acting" dari aparat keamanan (ABRI) yang acapkali mengintimidasi anggota masyarakat, semata-mata untuk kemenangan GOLKAR, merupakan cacat-cacat politik dalam PEMILU tahun 1971 (Suryadinata, 1992; Prasdi *et al.,* 1999; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Protes dan kritikan dari masyarakat luas itu, tentu saja, tidak banyak diberitakan dan diberikan pandangan oleh surat-surat kabar di Indonesia, termasuk *Kompas* di Jakarta dan *Pikiran Rakyat* di Bandung, yang memang telah menyadari kedudukan dan perannya sebagai pers yang tidak bebas dan harus memiliki tanggung jawab sosial yang besar kepada pemerintah Orde Baru, bukan kepada masyarakat luas (*cf* Naomi, 1996; Waluyo, 1997; Hill, 2011; Alam, 2012; dan Prastowo, 2017).

Sikap Pemerintah Orde Baru terhadap Pers dalam PEMILU Tahun 1971. Seperti halnya yang dilakukan

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia

pada masa awal Orde Baru, pemerintah pun bertindak secara preventif dalam menghadapi kemungkinan yang akan terjadi, demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan PEMILU (Pemilihan Umum), terutama dalam menanggapi pemberitaan-pemberitaan yang muncul di berbagai media massa. Masih belum fahamnya sebagian masyarakat Indonesia untuk berdemokrasi secara benar, hal ini terlihat dengan adanya pembreidelan pada beberapa surat kabar yang tidak sependapat atau sejalan dengan pemerintah (Smith, 1983; Naomi, 1996; Surjomihardjo ed., 2002; Hill, 2011; dan Baskoro, 2018).

Hal itu dialami oleh harian *KAMI* di Jakarta, surat kabar yang dikelola oleh para Mahasiswa atau Alumni Mahasiswa, yang sebenarnya berjasa dalam menumbangkan Presiden Soekarno (pemerintah Orde Lama) di satu sisi; dan, di sisi lain, mengusung Jenderal Soeharto untuk menjadi Presiden pada masa awal Orde Baru. Begitu pula dengan *Duta Masjarakat* di Jakarta, surat kabar milik organisasi Islam NU (*Nahdatul Ulama*), yang pada hari pelaksanaan PEMILU dikenakan larangan terbit sehari. NU memang menjadi saingan yang cukup berat bagi GOLKAR dalam PEMILU tahun 1971 (Cahyono, 1992; Surjomihardjo ed., 2002; Hill, 2011; Haritajaya, 2017; Nisa, Na'im & Umamah, 2017; dan Suwirta, 2018).

Menanggapi larangan terbit dua surat kabar tersebut, surat kabar *Kompas* di Jakarta menurunkan tajuk rencana yang berjudul "Sajang sampai Terjadi". Isi tajuk rencananya, secara panjang-lebar, adalah sebagai berikut:

> *Itulah reaksi kita setelah mendengar dihentikannja penerbitan harian KAMI dan Duta Masjarakat untuk sehari, tepat pada hari Pemilu 3 Djuli; dan larangan terbit datang dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Alasannja, dua harian itu dianggap melanggar ketentuan-ketentuan "minggu tenang".*
>
> *Alasan praktis, menurut hemat kita, tidak ada lagi. Sudah berhari-hari, kedua harian itu melaporkan kedjadian-kedjadian jang beritanja bisa dianggap melanggar ketentuan "minggu tenang". Baru pada hari terachir, hari Pemilu, larangan terbit didjatuhkan.*
>
> *Disatu pihak, ini tentu karena sebelumnja Kopkamtib masih memberikan peringatan-peringatan. Sekalipun demikian, larangan, djustru pada hari terachir, tidak mempunjai alasan praktis lagi. Sebab, ternjata toh pemberitaan-pemberitaan jang dianggap melanggar ketentuan "minggu tenang" itu tidak memanaskan keadaan.*
>
> *Apakah Kopkamtib mempunjai wewenang menghentikan penerbitan surat kabar? Punja, berdasarkan ketetapan MPRS No.IX, sumber hukum Kopkamtib, bukan Undang-Undang Pokok Pers; sumber hukumnja adalah Ketetapan MPRS No.IX.*
>
> *Apabila Kopkamtib berpendapat bahwa keamanan dibahajakan, maka lembaga itu bisa mengambil tindakan darurat; konsepsi ini oleh pengertian pers bebas, belum bisa diterima. Apabila djelas situasi menundjukkan adanja "clear and present danger", bahaja jang djelas lagi mengantjam setjara darurat, maka tindakan preventif terhadap pers bisa diterima.*
>
> *Kalau demikian halnja, maka jang harus dinilai ialah apakah keadaan memang benar-benar menundjukan "clear and present danger". Kok dua harian itu sampai perlu dihentikan penerbitannja. Apakah pemberitaan kedua harian itu benar-benar membangkitkan atau menjebabkan timbulnja "clear and present danger"?*
>
> *Menurut hemat kita, tidak ada buktinja sudah berhari-hari sebelumnja, kedua harian itu memuat berita-berita senada jang mendjadi alasan dihentikannja penerbitan kedua harian itu. Begitu Pemilu berlangsung, semua pihak bahkan mengakui pemilihan berdjalan lantjar dan tertib.*
>
> *Karena kedua harian itu dihentikan penerbitannja sehari pada tanggal 3 Djuli, tepat di hari Pemilu, maka tidak bisa dikatakan: "Pemilu berdjalan lantjar dan tertib, karena harian itu tidak terbit".*
>
> *Kita paham, doktrin keamanan kita memang lebih mengandalkan tindakan preventif daripada tindakan represif, seperti di negara-negara Barat. Artinja, lebih bersikap mentjegah daripada menunggu berbuat, kalau keadaan sudah terlandjur bahaja.*
>
> *Sekalipun demikian, untuk suatu tindakan darurat jaitu menghentikan penerbitan pers, toh harus benar-benar ada alasan kuat adanya "clear and present danger" itu.*
>
> *Untuk harian KAMI, bahkan terdjadi ironi. Kita bisa mengikuti politik pemberitaan dan tadjuknja. Positif sikapnja pada usaha pembaruan politik lewat Golkar. Ini dikonfirmasikan lagi dengan tadjuknja pada 2 Djuli, dimana harian itu mengandjurkan para pemilih untuk menusuk Golkar.*
>
> *Tapi sebagai harian, surat kabar itu*

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia
ISSN 2407-7348 *and* ***www.journals.mindamas.com/index.php/sipatahoenan***

berusaha memenuhi standar pers jang baik dalam pemberitaannja, jaitu "cover both sides", sedjauh mungkin memberitakan semua pihak.

Setjara normal, harian jang berbuat demikian akan lebih dipertjaja lagi opininja. Dengan kata lain, lebih berpengaruh usahanja mengadjak, mimilih, dan menusuk Golkar.

Harus diakui, dengan menindak harian KAMI dan Duta Masjarakat, jang berbeda sikapnja terhadap Golkar, Kopkamtib telah bertindak tidak memihak. Bertindak menurut satu ukuran.

Tetapi sikap tidak memihak yang terpudji ini, tidak mengurangi kebenaran bahwa pemberitaan jang dianggap melanggar "minggu tenang" itu ada hubungannja dengan soal Pemilu, soal persaingan Golkar dan partai. Dalam persaingan itu, harian KAMI lewat opininja memihak Golkar.

Kesimpulan kita: Kopkamtib memang berwenang mengambil tindakan diluar hukum biasa berdasarkan ketetapan MPRS IX jang masih berlaku. Tetapi tindakannja harus berdasarkan kedaruratan demi keamanan.

Dalam soal harian KAMI dan Duta Masyarakat, kita berbeda penilaian. Menurut hemat kita, unsur "clear and present danger" tidak terasa benar di sini, maka tindakan menghentikan terbit, menurut hemat kita, tidak perlu (Tajuk Rencana *Kompas,* 5 Juli 1971).

Hal itu juga termuat dalam catatan pojok surat kabar *Kompas* di Jakarta, sebagai berikut:

Semua orang bilang, Pemilu berjalan lantjar dan tertib!

Mang Usil lantas boleh bilang, rakjat Indonesia memang sudah matang untuk proses demokrasi, tinggal lagi tundjukkan arahnja jang benar?

Jang dapat suara banjak, lebih besar tanggung djawabnja untuk membuat hidup rakjat banjak tambah baik, tambah menikmati keadilan, dan rasa aman.

Tugas Mang Usil djaga arah dan pelaksanaan jang menudju kesedjahteraan rakjat itulah.

Harian KAMI mestinja ikut senang, sebab pilihannja jaitu Golkar, naga-naganja dapat suara banjak dimana-mana.

Sajang, Mang Usil dengar, rekan demonstran malah kena disetop penerbitannja, hari Sabtu jang lalu. Ada-ada sadja (Catatan Pojok *Kompas,* 5 Juli 1971).

Pemberitaan dan pandangan pers, khususnya surat kabar, terhadap PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1971, dengan demikian, harus seiring dan sejalan dengan apa-apa yang dikehendaki pemerintah Orde Baru. Apabila pers masih ingin tetap hidup dan bisa menjalankan fungsi kontrol sosialnya, maka harus menerima kenyataan bahwa konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab itu adalah fungsi "tanggung jawab"-nya yang harus diutamakan kepada pemerintah, bukan fungsi "bebas"-nya dalam mengkritik dan mengontrol pemerintah (Abar, 1991; Alolilweri, 1991; Oetama, 2001 dan 2002; Parker, 2013; dan Baskoro, 2018).

PEMILU tahun 1971 adalah peristiwa penting bagi pemerintah Orde Baru dalam rangka untuk mencari dan mendapatkan legitimasi kekuasaan, dengan menjadikan GOLKAR (Golongan Karya) sebagai kendaraan politiknya. Dalam konteks inilah, pemerintah Orde Baru dan unsur-unsur pendukungnya, terutama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), berusaha memenangkan GOLKAR dalam besaing dengan partai-partai politik lainnya di Indonesia. Cara-cara GOLKAR menang dalam PEMILU tahun 1971, yakni lebih dari 60% suara, akan menjadi preseden dan dilanjutkan pada PEMILU selanjutnya, selama pemerintahan Orde Baru berkuasa di Indonesia, yakni PEMILU tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 (Liddle, 1992; Suryadinata, 1992; Puspita, 2012; Riadi, 2013; dan Nisa, Na'im & Umamah, 2017).

Pers yang bersikap kritis kepada pemerintah Orde Baru, bahkan terhadap cara-cara GOLKAR dalam memenangkan PEMILU, tidak jarang harus menghadapi pembredelan. Selain harian *KAMI* dan *Duta Masjarakat*, seperti yang telah disebutkan, kisah pembredelan pers pada masa Orde Baru – karena bersikap kritis dan tidak sejalan dengan pandangan pemerintah – memiliki daftar yang cukup panjang, seperti: surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta; mingguan *Mahasiswa Indonesia* di Bandung; surat kabar *Al-Bachar* di Bandung; surat kabar *Pedoman* di Jakarta; majalah *Tempo* di Jakarta; surat kabar

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia

Sinar Harapan di Jakarta; dan sebagainya. Media massa tersebut, setelah dibredel, ada yang bisa hidup dan terbit kembali, tapi juga ada yang mati dan tidak terbit lagi untuk selama-lamanya (Abar, 1991; Surjomihardjo ed., 2002; Haritajaya, 2017; Nisa, Na'im & Umamah, 2017; dan Suwirta, 2018).

Surat kabar *Kompas* di Jakarta dan *Pikiran Rakyat* di Bandung adalah dua contoh media masa yang bersikap moderat dan hati-hati, berdasarkan pengalamannya dalam menghadapi PEMILU tahun 1971. Unsur-unsur berita dan pandangan dalam kedua surat kabar itu, pada umumnya, mendukung program dan kebijakan pemerintah Orde Baru, termasuk kemenangan GOLKAR dalam PEMILU Orde Baru. Kalau pun ada kritik dan pandangan yang berlainan dengan pemerintah Orde Baru, maka surat kabar *Kompas* di Jakarta dan *Pikiran Rakyat* di Bandung biasanya akan menyampaikannya secara tidak langsung dalam bahasa yang moderat, samar-samar, dan tidak menyinggung perasaan pemerintah (Lesmana, 2001; Oetama, 2001 dan 2002; Suwirta, 2004; Parker, 2013; dan Baskoro, 2018).

Dengan sikapnya yang seperti itu, surat kabar Kompas di *Jakarta* dan *Pikiran Rakyat* di Bandung jarang mendapat tindakan drastis dari pemerintah Orde Baru, berupa pembredelan, yang sangat ditakuti oleh kalangan pers. Sikap pimpinan kedua surat kabar tersebut, terutama P.K. (Petrus Kanisius) Ojong dan Jacob Oetama dari *Kompas* di Jakarta dan Sakti Alamsyah dan Atang Ruswita dari *Pikiran Rakyat* di Bandung, menarik untuk dicermati bahwa pers yang bersikap moderat, lebih mengutamakan tanggung jawab sosial daripada kebebasan semata, serta bersikap akomodatif terhadap pemerintah sebagai penguasa yang kuat, ternyata lebih menyelamatkan kehidupan pers di Indonesia (*cf* Lesmana, 2001; Suwirta, 2004; Hill, 2011; Galih, 2016; dan Prastowo, 2017). Dua surat kabar yang terbit di dua kota yang berbeda itu, juga pada akhirnya bisa tetap terbit dan bertahan hidup hingga sekarang.

KESIMPULAN [2]

PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1971 adalah peristiwa penting bagi pemerintah Orde Baru dalam rangka untuk mencari dan mendapatkan legitimasi kekuasaan, dengan menjadikan GOLKAR (Golongan Karya) sebagai kendaraan politiknya. Pemerintah Orde Baru dan unsur-unsur pendukungnya, terutama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), berusaha memenangkan GOLKAR dalam besaing dengan partai-partai politik lainnya di Indonesia. Cara-cara GOLKAR menang dalam PEMILU tahun 1971, yakni lebih dari 60% suara, telah menjadi preseden dan dilanjutkan pada PEMILU selanjutnya, selama pemerintahan Orde Baru berkuasa di Indonesia.

Pers yang bersikap kritis kepada pemerintah Orde Baru, bahkan terhadap cara-cara GOLKAR dalam memenangkan PEMILU, tidak jarang harus menghadapi pembredelan. Dalam konteks ini, surat kabar *Kompas* di Jakarta dan *Pikiran Rakyat* di Bandung adalah dua contoh media masa yang bersikap moderat dan hati-hati, berdasarkan pengalamannya dalam menghadapi PEMILU tahun 1971. Unsur-unsur berita dan pandangan dalam kedua surat kabar itu, pada umumnya, mendukung program dan kebijakan pemerintah Orde Baru, termasuk kemenangan GOLKAR dalam PEMILU Orde Baru. Kalau pun ada kritik dan pandangan yang berlainan dengan pemerintah Orde Baru, maka surat kabar *Kompas* di Jakarta dan *Pikiran Rakyat* di

[2] ***Sebuah Pengakuan:*** Artikel ini – sebelum diubah-suai dan dikemas-kini dalam bentuknya sekarang – merupakan hasil penelitian untuk menunjang perkuliahan Sejarah Orde Baru dan Reformasi di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung. Saya merasa berhutang budi, banyak menerima bantuan, serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, khususnya para Mahasiswa yang mengambil matakuliah tersebut dan para Asisten Dosen saya (almarhumah Farida Sarimaya, Moch Eryk Kamsori, dan Iing Yulianti), sehingga terwujudnya penelitian ini hingga menjadi artikel ilmiah, sebagai hasil ringkasan penelitian, dalam bentuknya sekarang. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam artikel ini tetap menjadi tanggung jawab akademik saya secara pribadi, dan tidak ada kena-mengena dengan bantuan yang telah mereka berikan.

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia
ISSN 2407-7348 *and* ***www.journals.mindamas.com/index.php/sipatahoenan***

Bandung biasanya akan menyampaikannya secara tidak langsung dalam bahasa yang moderat, samar-samar, dan tidak menyinggung perasaan pemerintah Orde Baru yang tengah berkuasa.[3]

Referensi

Abar, Akhmad Zaini. (1991). "Kritik Sosial, Pers, dan Politik Indonesia" dalam Mohtar Mas'oed [ed]. *Kritik Sosial dalam Wahana Pembangunan*. Yogyakarta: UII [Universitas Islam Indonesia] Press.

Abdulsalam, Husein. (2018). "Bagaimana Soeharto Mengambil-Alih Kekuasaan dari Soekarno?" dalam *Torto.Id,* pada 22 Februari. Tersedia secara online juga di: https://tirto.id/bagaimana-soeharto-mengambil-alih-kekuasaan-dari-sukarno-cEXm [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 19 Januari 2019].

Adam, Asvi Warman. (2018). "Beberapa Catatan tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965" dalam *ARCHIPEL,* Volume 95. Tersedia secara online juga di : https://journals.openedition.org/archipel/604 [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 19 Januari 2019].

Adiane, Fredita. (2014). "Hubungan G30S/PKI terhadap Peralihan Kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, 1965-1967". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: FIS UNY [Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta]. Tersedia secara online juga di: https://eprints.uny.ac.id/16216/ [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2018].

Akla, Saydah. (2007). "Perkembangan Pers dalam Kaitannya dengan Perkembangan Politik di Semarang Tahun 1912-1930". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Semarang: FIS UNNES [Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang].

Alam, Gigih Sari. (2012). "Sejarah Harian Kompas sebagai Pers Partai Katolik" dalam *FIMADANI: Bersatu dalam Bingkai Madani,* pada 10 September. Tersedia secara online juga di: http://fimadani.com/sejarah-harian-kompas-sebagai-pers-partai-katolik/ [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Oktober 2018].

Ali, Djamal. (1995). *Sekilas Perjalanan Hidup Saya: Seperti yang Dituturkan kepada Cendrawati dan Pradjoto*. Jakarta: SPS [Serikat Penerbitan Suratkabar] Pusat.

Alolilweri. (1991). *Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Andrianti, Nita. (2015). "Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional" dalam *INFORMASI: Kajian Ilmu Komunikasi,* Vol.45, No.1 [Juni]. Tersedia secara online juga di: http://oaji.net/articles/2016/3122-1457933828.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].

Andriawan, Novi. (2007). "Sejarah Politik Islam Indonesia: Studi Kasus PARMUSI Tahun 1967-1971". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/15239/1/NOVI%20ANDRIAWAN-FITK.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].

Bakti, Andi F. & Muhamad Rosit [eds]. (2016). *Literasi Politik dan Pelembagaan Pemilu*. Jakarta: FIKOM UP Press bekerjasama dengan The Policy Institute dan Churia Press. Tersedia secara online juga di: http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/70132110021532073205 20July2018.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].

Baskoro, Lestantya R. (2018). "Kebebasan Pers di Indonesia" dalam *TEMPO.CO*, pada 11 Februari. Tersedia secara online juga di: https://hukum.tempo.co/read/1059485/kebebasan-pers-di-indonesia [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Februari 2019].

Cahyono, Heru. (1992). *Peranan Ulama dalam Golkar, 1971-1980: Dari Pemilu 1971 sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Catatan Pojok *Kompas* di Jakarta: 1 Juli 1971.

Catatan Pojok *Kompas* di Jakarta: 5 Juli 1971.

Catatan Pojok *Kompas* di Jakarta: 6 Juli 1971.

Catatan Pojok *Kompas* di Jakarta: 7 Juli 1971.

Catatan Pojok *Pikiran Rakyat* di Bandung: 5 Juli 1971.

Catatan Pojok *Pikiran Rakyat* di Bandung: 9 Juli 1971.

Chaniago, J.R. *et al.* (1987). *Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka, 1945-1985*. Jakarta: PT Merdeka Sarana Usaha.

Christine, Daymon & Immy Holloway. (2008). *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Cummunication*. Yogyakarta: Penerbit Bentang, terjemahan Cahya Wiratama.

Crouch, Harold. (1986). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, Terjemahan.

Eriyanto. (2000). *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hemegomi: Studi atas Pidato-pidato Politik Soeharto*. Jakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.

Feith, Herbert. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, terjemahan Nugroho Katjasungkana *et al.*

Gaffar, Afan. (1993). "Islam dan Politik dalam Era Orde Baru: Mencari Bentuk Artikulasi yang Tepat"

[3]***Pernyataan:*** Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa artikel ini adalah asli karya sendiri dan ianya bukan hasil tindakan plagiat, karena sumber-sumber yang saya kutip dan rujuk dalam analisis, tersedia dan jelas dicantumkan dalam daftar Referensi. Artikel ini juga belum pernah dikirim, direviu, dan diterbitkan oleh jurnal ilmiah lainnya. Saya bersedia di-beri sanksi akademik, sekiranya apa-apa yang saya nyatakan ini ternyata, di kemudian hari, adalah tidak benar.

dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmiah,* Vol.IV, No.2.
Galih, Bayu. (2016). "Jakob Oetama, PK Ojong, dan Sejarah di Balik Lahirnya Kompas" dalam *KOMPAS.COM: Jernih Melihat Dunia,* pada 29 September. Tersedia secara online juga di: https://nasional.kompas.com/read/2016/09/29/06200031/jakob.oetama.pk.ojong.dan.sejarah.di.balik.lahirnya.kompas [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Oktober 2018].
Gottschalk, Louis. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI [Universitas Indonesia], Terjemahan.
Hadi, Dwi Wahyono & Gayung Kasuma. (2012). "Propaganda Orde Baru, 1966-1980" dalam *Verleden,* Vol.1, No.1 [Desember]. Tersedia secara online juga di: http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal%20propaganda_dwiwahyonohadi.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].
Haris, Syamsudin. (1998). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI.
Haritajaya, O. Bintang. (2017). "Pembredelan Pers di Masa Orde Baru, 1966-1998". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan IPS FKIP USD [Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma]. Tersedia secara online juga di: http://repository.usd.ac.id/9908/2/121314020_full.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Oktober 2018].
Hill, David T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan LSPP, terjemahan Gita Widya Laksmini Soerjoatmodjo.
Iskantini, Euis. (2001). "Pandangan Harian Umum Pikiran Rakyat terhadap Masalah-masalah Politik Indonesia, 1950-1965. *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia].
Isnaeni, Hendri F. (2017). "Sukarno Meninggal Dunia" dalam *HISTORIA: Masa Lampau Selalu Aktual*. Tersedia secara online juga di: https://historia.id/politik/articles/sukarno-meninggal-dunia-P1B3K [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].
Junaedhie, Kurniawan. (1991). *Ensiklopedia Pers Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Lesmana, Cipta. (2001). *20 Tahun Kompas: Profil Pers Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Erwin-Rika Press, edisi revisi.
Liddle, R. William. (1992). *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
Limah, Hutri, Cahyo Budi Utomo & Andy Suryadi. (2018). "Poster dan Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta Tahun 1945-1949" dalam *Journal of Indonesian History*, Volume 7(1), hlm.35-44.
Makah, Masmimar. (1977). "Pojok sebagai Penyalur Kritik" dalam *Prisma*, No.10 [Oktober]. Jakarta: Penerbit LP3ES.
Mallarangeng, Rizal. (1992). *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Harian Kompas dan Suara Karya*. Jakarta: Rajawali Pers.
McGlynn, John H. *et al.* [eds]. (2007). *Indonesia in the Soeharto Years: Issues, Incidents, and Images*. Jakarta: Lontar Foundation.
Moedjanto, G. (1992). *Indonesia Abad ke-20: Dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELITA III*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Nambo, Abdulkadir B. & Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. (2005). "Memahami tentang Beberapa Konsep Politik: Suatu Telaah dari Sistem Politik". Tersedia secara online di: https://media.neliti.com/media/publications/154709-ID-memahami-tentang-beberapa-konsep-politik.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].
Naomi, Omi Intan. (1996). *Anjing Penjaga: Pers di Rumah Orde Baru*. Jakarta: Gorong-gorong Budaya.
Nashrudin, Achmad P. (2017). "Ekonomi Politik Media pada Pemberitaan Pemilukada Banten 2011 oleh Radar Banten dan Baraya TV" dalam *Komuniti,* Vol.IX, No.1 [Maret], hlm.25-43.
"News: Pidato Pelengkap Nawaksara Presiden Sukarno tentang G30S/PKI" dalam *Kumparan,* pada 19 September 2017. Tersedia secara online juga di: https://kumparan.com/kumparannews/pidato-pelengkap-nawaksara-presiden-sukarno-tentang-g30s-pki [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2018].
Nisa, Noviah Iffatun, Mohammad Na'im & Nurul Umamah. (2017). "Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971-1997" in *Jurnal Historica,* Volume 1, Issue 1, pp.141-151.
Noer, Deliar. (1987). *Partai-partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965*. Jakarta: Graffiti Press.
Oetama, Jacob. (2001). *Pers Indonesia Berkomunikasi dengan Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Kompas.
Oetama, Jacob. (2002). *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: Penerbit LPE3S, edisi kedua.
Parker, Peter. (2013). "Sejarah Sistem Pers Indonesia". Tersedia secara online di: http://lookattheskyatnight.blogspot.com/2013/10/sejarah-sistem-pers-indonesia.html [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].
Permadi, Singgih Bambang & Aman. (2014). "Proses Pemilihan Umum 1955 di Indonesia". *Ringkasan Skripsi Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY [Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta]. Tersedia secara online juga di: https://eprints.uny.ac.id/21750/9/ringkasan.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].
Poerwantana, P.K. (1994). *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto [eds]. (1987). *Sejarah Nasional*

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia
ISSN 2407-7348 *and* ***www.journals.mindamas.com/index.php/sipatahoenan***

Indonesia VI. Jakarta: PN Balai Pustaka.
Prasdi, Nanang Dwi *et al.* (1999). *Golkar Retak*. Jakarta: Penerbit ISAI [Institut dan Studi Arus Informasi].
Prastowo, Ramdhan Budi. (2017). "Muncul dan Perkembangannya Surat Kabar *Pikiran Rakyat* sampai Awal Orde Baru di Bandung (1950-1974)". *Ringkasan Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY [Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta]. Tersedia secara online juga di: https://eprints.uny.ac.id/53255/6/Jurnal%2011407144025.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].
Puspita, Nia Endra. (2012). "Strategi Politik dan Kemenangan Golkar di Semarang pada Pemilu 1971" dalam *JIH: Journal of Indonesian History,* Vol.1, No.1, hlm.30-34.
Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
Raditya, Iswara N. (2018). "Orde Baru Membunuh Sukarno Pelan-pelan" dalam *Tirto.Id,* pada 10 Maret. Tersedia secara online juga di: https://tirto.id/orde-baru-membunuh-sukarno-pelan-pelan-cFCF [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 19 Januari 2019].
Riadi, Fajar. (2013). "Golkar sebagai Pengganti Partai" dalam *HISTORIA: Masa Lampau Selalu Aktual,* pada 18 Oktober. Tersedia secara online juga di: https://historia.id/politik/articles/golkar-sebagai-pengganti-partai-vxmrP [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2018].
Ricklefs, M.C. (1999). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Terjemahan, edisi revisi.
Rocamora, J.E. (1991). *Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI, 1946-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Terjemahan.
Sagala, Budiman B. (1982). *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Said, Tribuana. (1988). *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
Santoso, Topo. (2004). "Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing" dalam *Jurnal Hukum Internasional,* Vol.1, No.4 [Juli]. Tersedia secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/65491-ID-proses-pemilu-di-indonesia-dari-sudut-pa.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].
Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (1985). *30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1975*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
Siagian, Sabam. (1986). "Fungsi Tajuk Surat Kabar" dalam Herald Tidar & Petrus Suryadi [eds]. *Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sitompul, Martin. (2017). "Memasung Kaki Banteng" dalam *HISTORIA: Masa Lampau Selalu Aktual*. Tersedia secara online juga di: https://historia.id/politik/articles/memasung-kaki-banteng-D8eOR [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2018].
Sjamsuddin, Helius. (2014). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Smith, Edward C. (1983). *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers, Terjemahan.
Sobur, Alex. (2008). "Membaca Pojok Koran" dalam *MEDIATOR: Jurnal Komunikasi,* Volume 9(1). Tersedia secara online juga di: https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1135 [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2018].
Sukarna. (1991). *Analisis Politik*. Bandung: Mandar Maju.
Surjomihardjo, Abdurrachman [ed]. (2002). *Beberapa Segi Perkambangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Suryadinata, Leo. (1992). *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
Suwardi, H. (1993). *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia: Suatu Studi Komunikasi Politik terhadap Liputan Berita Kampanye Pemilu 1987*. Jakarta: Pustaka Harapan.
Suwirta, Andi. (2000). *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), 1945-1947*. Jakarta: Balai Pustaka.
Suwirta, Andi. (2004). "Atang Ruswita, Pikiran Rakyat, dan Kritik Sosial" dalam Asmawi Zainul & Didin Saripudin [eds]. *50 Tahun Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 1954-2004: Mozaik Pemikiran tentang Sejarah, Budaya, dan Pendidikan Sejarah*. Bandung: Historia Utama Press.
Suwirta, Andi. (2017). *Revolusi Indonesia dalam News & Views: Sebuah Antologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Suwirta, Andi. (2018). "Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, 1966-1974" dalam *MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan,* Volume 3(2), September, hlm.113-136. Bandung, Indonesia: UPI [Indonesia University of Education] Press, ISSN 2527-3868 (print) and 2503-457X (online).
Tajuk Rencana *Kompas* di Jakarta: 1 Juli 1971.
Tajuk Rencana *Kompas,* 5 Juli 1971
Tajuk Rencana *Kompas* di Jakarta: 5 Juli 1971.
Tajuk Rencana *Kompas* di Jakarta: 6 Juli 1971.
Tajuk Rencana *Kompas* di Jakarta: 6 Mei 1976.
Tajuk Rencana *Pikiran Rakyat* di Bandung: 5 Juli 1971.
Tambunan, A.S.S. (1986). *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD*. Jakarta: Bina Cipta.
Taufik, I. (1977). *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: PT Triyinco.
Utami, Ratna. (2001). "Pandangan dan Peranan Surat Kabar Bulanan *Poetri Mardika* dalam Memperjuangkan Emansipasi Wanita di Indonesia, 1915-1920". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI

[Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia].

Waluyo, Joko. (1997). *Pengamatan Pendapat Umum melalui Surat Kabar tentang Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 1998*. Jakarta: Balai Penerangan dan Pengembangan Penerangan, Deppen RI [Departemen Penerangan Republik Indonesia].

Wardani, Dharyanto Tito. (2016). "Peranan Surat Kabar *Soerapati* dalam Perlawanan Intelektual Pribumi di Jawa Barat Tahun 1923-1925" dalam *Patanjala,* Vol.8, No.1 [Maret], hlm.1-20. Tersedia secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/291769-peranan-surat-kabar-soerapati-dalam-perl-173a709e.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2018].

Wardaya, Baskara T. (2004). "Membuka Kotak Pandora: Pemilu 1955" dalam *Jurnal Basis*, Edisi No.03-04 [Maret-April].

Wawancara dengan Atang Ruswita, Pimpinan Surat Kabar *Pikiran Rakyat,* di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 24 Maret 2001.

Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].

Zuhra, Wan Ulfa Nur. (2017). "Pertumbuhan Oplah Koran: Melambat, Melambat, Menurun" dalam *Tirto.Id,* pada 8 Februari. Tersedia secara online juga di: https://tirto.id/pertumbuhan-oplah-koran-melambat-melambat-menurun-ciy7 [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].

© 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java, Indonesia
ISSN 2407-7348 *and* ***www.journals.mindamas.com/index.php/sipatahoenan***